

SEKURITISASI WACANA KHILAFAH DI INDONESIA

Prihandono Wibowo

Program Studi Hubungan Internasional UPN Veteran

Jawa Timur, Indonesia

E-mail: prihandono_wibowo.hi@upnjatim.ac.id

Abstract: Caliphate restoration is a religious expression that has developed widely in Indonesia since the reformation era in 1998. Historical romanticism, the study of Islamic political jurisprudence, and Islamic eschatology are the basis for the development of religious expressions regarding the restoration of the Caliphate in Indonesia. Since the reformation era, various Islamic groups have idealized the restoration of the Caliphate with a variety of methods. The discourse regarding the Caliphate idea developed widely in society. However, in contemporary Indonesian politics, the Caliphate idea is identified by the State as a dangerous discourse for State sovereignty. Caliphate's discourse is identified with the trend of radicalism and terrorism. Religious groups that have longing expressions of the existence of the Caliphate are identified as "radical" or "terrorist" groups. Stigmatization of the Caliphate idea is a product of securitization of religious discourse that develops in society. In the concept of securitization, securitizing actors try to convince the public to believe that there is an existential "threat" from the Caliphate discourse against state sovereignty. Using the concept of securitization, this paper seeks to describe the process of securitization and the consequences of that process on the development of Caliphate discourse in Indonesia.

Keywords: Khilafah; Religious Expression; Securitization

Idealisme Mengenai Khilafah

Perihal kepemimpinan pasca kewafatan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaibi Wasallam* menjadi tema sentral dalam sejarah umat Islam. Dalam Islam, khilafah merupakan perwujudan kepemimpinan pengganti pasca-Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaibi Wasallam*. Khilafah berperan sebagai pemelihara urusan umat dan pengayom bagi umat Islam pasca Nabi

Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Eksistensi khilafah merupakan realita dalam sejarah peradaban Islam.

Dalam konteks historis, kekhilafahan memiliki “warisan” bagi peradaban Islam. Romantisme historis mengenai khilafah dicatat dalam beragam literatur sejarah. Kemajuan sains Timur Tengah di Abad Pertengahan, perkembangan berbagai ilmu agama, serta ekspansi kekuasaan politik, dikaitkan dengan masa keemasan kekhilafahan Islam, baik di era Dinasti Umayyah, Abbasiyah, maupun Ustmani. Memori kolektif mengenai khilafah juga dikenal dalam sejarah Nusantara. Literatur Melayu mengenal khalifah Ustmani di Turki dengan sebutan Sultan Rum.¹ Sejarah Aceh misalnya, memiliki hubungan intens dengan kekhilafahan Ustmani, termasuk Ketika Aceh menjalin hubungan dengan Khilafah Ustmani untuk menghadapi kekuatan Portugis.²

Dalam pidato kongres umat Islam Indonesia tahun 2015, Sultan Hamengkubuwono X menyatakan bahwa Sultan Turki telah mengukuhkan Raden Patah sebagai perwakilan kekhilafahan di tanah Jawa yang ditandai dengan penyerahan dua bendera berkalimat tauhid.³ Dalam konteks sejarah Indonesia, keruntuhan khilafah Ustmani pada 1924 menimbulkan reaksi dari umat Islam Indonesia. Pada 1924 tersebut, berdiri Komite Khilafat di Surabaya yang dipimpin Wondoamiseno dan KH Wahab Hasbullah.⁴

Pembahasan mengenai khilafah tidak hanya berkaitan dengan romantisme masa lalu. Keyakinan eskatologis akhir zaman menjadi salah satu dasar keyakinan mengenai kekhilafahan. Beberapa hadits mengenai akhir zaman menjelaskan akan kemunculan khilafah di akhir zaman. Khazanah pemikiran mengenai khilafah juga didapati dalam kajian fiqih *siyasi*. Kewajiban mengangkat khalifah, syarat-syarat khalifah, cara pengangkatan khalifah, menjadi sebagian pembahasan dalam kajian fikih mengenai khilafah.⁵ Khilafah merupakan institusi sentral dalam menjalankan syariat Islam. Terdapat beberapa aspek dalam syariat Islam yang tidak dapat diterapkan jika tidak ada institusi khilafah. Ketiadaan khilafah menyebabkan kewajiban-kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan. Karena itu, pengusung ide restorasi khilafah menjuluki mendirikan khilafah sebagai *Tajul Furudh* atau “mahkota kewajiban.”

Kombinasi romantisme masa lalu, tradisi fiqih politik, dan keyakinan eskatologi akhir zaman, menjadikan khilafah sebagai bagian khazanah dalam pemikiran politik Islam. Ekspresi kerinduan terhadap eksistensi khilafah berkembang di Indonesia sejak era reformasi 1998. Sejak era tersebut, beragam kelompok Islam di Indonesia memiliki ekspresi keagamaan terhadap kebangkitan kembali khilafah. Ekspresi keagamaan tersebut diwujudkan dalam beragam kegiatan dakwah. Khilafah merupakan wacana keagamaan yang berkembang seiring tren demokratisasi pasca reformasi 1998. Namun dalam dinamika politik Indonesia kontemporer, ekspresi keagamaan mengenai khilafah diidentikkan dengan radikalisme dan terorisme. Beragam kelompok pengusung wacana khilafah dianggap sebagai kelompok Islam “radikal” yang intoleran dan “anti-Kebhinnekaan.” Bahkan wacana khilafah kemudian dikaitkan dengan terorisme ISIS.

Gerakan Restorasi Khilafah sejak Era Reformasi 1998

Dalam konteks Indonesia modern, wacana restorasi khilafah mengemuka pasca-reformasi. Pasca reformasi 1998, terdapat beberapa gerakan Islam yang mengusung ide restorasi khilafah. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah kelompok yang secara eksplisit mengusung agenda penegakan khilafah. HTI kerap mengkritik demokrasi, kapitalisme, komunisme, dan nasionalisme. HTI juga mengkaji isu-isu aktual di bidang sosial, politik, dan ekonomi, serta menawarkan khilafah sebagai solusi problematika bangsa Indonesia. Kelompok HTI eksis dan berkembang sejak awal era reformasi.⁶ Pada tahun 2003, HTI pernah bertemu dengan Wakil Presiden Hamzah Haz menawarkan syariat Islam sebagai solusi mengatasi krisis.⁷ HTI menyelenggarakan acara bertema khilafah seperti Muktamar Khilafah dan Konferensi Khilafah Internasional. Beberapa tokoh nasional maupun mantan pejabat negara Indonesia pernah menghadiri acara-acara yang diinisiasi oleh HTI. Adyaksa Dault-mantan Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2004-2009- menghadiri Muktamar Khilafah yang diselenggarakan HTI pada tahun 2013. Wiranto-Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia era Presiden Soeharto- menghadiri acara yang diselenggarakan oleh HTI pada 2008. Dalam acara tersebut, Wiranto yang menjadi salah satu pembicara di acara HTI tersebut menyatakan bahwa

HTI dan Partai Hanura-partai yang dipimpin Wiranto- adalah “serupa tapi tidak sama.”⁸

Acara-acara HTI bertema khilafah dilakukan di ruang-ruang publik. Konferensi Khilafah Internasional diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno.⁹ Pada 2013, TVRI menayangkan acara Mukhtamar Khilafah tingkat nasional. TVRI Jawa Timur pernah menayangkan acara Mukhtamar Khilafah di Jawa Timur pada tahun yang sama dengan durasi satu jam. Dalam level daerah, HTI-di kota Malang- pada 2012 mendapat penghargaan dari Polres Malang sebagai organisasi paling tertib dalam melakukan unjuk rasa. Penghargaan tersebut disaksikan jajaran pemerintahan dan aparat keamanan di Kota Malang.¹⁰ Beberapa aktivis HTI diterima sebagai anggota MUI baik di pusat maupun di provinsi, maupun kabupaten.¹¹ HTI juga tercatat pernah bekerjasama dengan beberapa Dinas Pendidikan daerah untuk membina kegiatan ekstrakurikuler dan pelatihan sejarah bagi guru agama Islam.¹² HTI tercatat pernah diundang beraudiensi dengan DPR.¹³ Pada tahun 2014, HTI mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.¹⁴

Terdapat beberapa kelompok lain yang memiliki aspirasi restorasi khilafah. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) adalah salah satu kelompok tersebut. Kongres Mujahidin I di Yogyakarta pada 1997, menghasilkan Piagam Yogyakarta dan Majelis Mujahidin. Salah satu butir dalam piagam Yogyakarta berbunyi, “Mujahidin Indonesia membentuk Majelis Mujahidin menuju terwujudnya Imamah (Khilafah), kepemimpinan umat baik di dalam negeri maupun dalam kesatuan umat Islam sedunia”.¹⁵ Namun berbeda dengan HTI, MMI lebih berfokus pada isu penegakan syariat Islam secara langsung di negara atau masyarakat.¹⁶ MMI memiliki agenda memformalkan syariat Islam sebagai bagian konstitusi negara.¹⁷ Di antaranya MMI memperjuangkan Piagam Jakarta.¹⁸ Bagi MMI, pemberlakuan syariat Islam di kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan hal sangat penting. Sebagaimana tertuang dalam visi kelompok tersebut yaitu “Adapun penegakan Syari’ah Islam dalam kehidupan sosial kenegaraan, artinya berjuang demi memberlakukan Syari’ah Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terwujud negara yang adil, makmur dan sejahtera dalam ampunan Allah SWT, sebagai basis Khilafah Islamiyah”.¹⁹ Meski

demikian, MMI memiliki substansi idealisme yang sama, yaitu negara Khilafah Islamiyah.²⁰ Baik MMI dan HTI meyakini bahwa keberadaan khilafah untuk menciptakan tatanan Islam secara menyeluruh.²¹

Font Pembela Islam (FPI) juga merupakan kelompok yang memiliki idealisme khilafah. AD/ART FPI menyatakan “Visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah dan pengawalan jihad.”²² Meski demikian FPI memiliki penjelasan berbeda mengenai cara mendirikan khilafah. FPI beranggapan bahwa mendirikan khilafah tidak menafikan realita negara bangsa dalam politik kontemporer.²³ Habib Rizieq Shihab, Imam Besar FPI, menyatakan bahwa secara prinsip khilafah versi HTI adalah ideal, namun untuk mencapai idealisme tersebut, FPI memiliki konsep tersendiri yang lebih realistis, yaitu sinergi negara-negara Islam.²⁴ Habib Rizieq Shihab menyatakan bahwa khilafah adalah bagian dari ajaran Islam yang wajib untuk terus disosialisasikan.²⁵

Pimpinan ketiga kelompok tersebut, yaitu MMI, FPI, HTI, pernah diundang melakukan dialog oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang hubungan antar agama yang diketuai KH. Ma’ruf Amin pada 2014. Pertemuan pada 2014 tersebut mengambil topik Peran Umat Beragama dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan. Dalam pertemuan tersebut, KH. Ma’ruf Amin menyimpulkan bahwa penegakan syariat Islam tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar.²⁶

Kelompok lain yang dikenal memiliki idealisme khilafah adalah Khilafatul Muslimin. Kelompok ini juga mengklaim bahwa penegakan khilafah adalah hal yang diwajibkan dalam agama.²⁷ Namun berbeda dengan kelompok lain yang masih mengupayakan restorasi khilafah, kelompok Khilafatul Muslimin mengklaim telah menjadi organisasi dengan sistem khilafah yang sah. Maklumat Khilafatul Muslimin pada tahun 1997 menjadi penanda pendirian khilafah kelompok tersebut. Abdul Qadir Hasan Baraja menjadi khalifah dari kekhilafahan kelompok Khilafatul Muslimin. Kelompok ini juga kerap melakukan aktivitas sosial keagamaan di beberapa kota. Selain itu, kelompok Khilafatul Muslimin juga melakukan baiat di berbagai wilayah Indonesia. Khilafatul Muslimin memiliki struktur dan ke-*mas’ul-an* yang tersebar di Indonesia. Pada 2016, Khilafatul Muslimin

mengklaim telah memiliki 16 wilayah, 68 Ummul Quro, dan 310 kemas'ulan di Indonesia.²⁸ Khilafatul Muslimin berkembang dengan kajian, ceramah, pondok pesantren, diskusi dan silaturahmi.²⁹

Khilafatul Muslimin menjelaskan bahwa khilafah yang mereka anut bukan sebagai sebuah negara, namun kesatuan dalam jamaah tanpa batas negara.³⁰ Khilafatul Muslimin menganalogikan kekhilafahannya dengan kepausan dalam tradisi Katholik Roma, bukan sebagai sebuah negara.³¹ Khilafatul Muslimin menyatakan bahwa khilafah versi kelompok tersebut tidak mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perkembangan kelompok Khilafatul Muslimin yang mengandalkan cara damai, dakwah, dan pendidikan. Khilafatul Muslimin menekankan bahwa khilafah kelompok tersebut tidak ingin menimbulkan konflik.

Deklarasi pendirian “khilafah” oleh ISIS di Syria dan Irak juga mempengaruhi diskursus mengenai khilafah di Indonesia. ISIS aktif menyebarkan propaganda mengajak kaum muslim Indonesia untuk “berhijrah” ke “khilafah” yang berpusat di Syria dan Irak.³² Dalam berbagai publikasi mengenai operasi perangnya, ISIS turut mengatasnamakan khilafah.³³ Klaim khilafah ini membedakan ISIS dengan kelompok “jihadis” lain seperti Al Qaeda. Ide khilafah hanya memiliki peran minor dan porsi kecil dalam diskursus Al Qaeda.³⁴

Sekuritisasi terhadap Wacana Khilafah di Indonesia

Khilafah Islam merupakan bagian dari khazanah pemikiran politik Islam dan realita sejarah peradaban Islam. Beragam kelompok Islam yang berkembang di Indonesia memiliki idealisme mengenai khilafah. Wacana mengenai khilafah identik sebagai ekspresi keagamaan sebagian umat Islam Indonesia. Hal ini ditunjang oleh fakta historis relasi khilafah dan Nusantara, keyakinan eskatologis, serta fiqih politik. Ide restorasi khilafah mengalami perkembangan di Indonesia. Berbagai kelompok mengekspresikan restorasi khilafah dalam berbagai variasinya. Ide khilafah menjadi bagian dari ekspresi keagamaan yang populer sejak pasca reformasi 1998. Wacana khilafah kemudian diterima oleh kalangan masyarakat yang lebih beragam, termasuk oleh kalangan kiai dan ustadz dari berbagai pondok pesantren *Ahlussunnah*

wal Jamaah.³⁵ Namun terjadi kontradiksi dalam perkembangan politik teraktual di Indonesia. Dalam konteks terkini, khilafah diilustrasikan dengan pandangan yang monolitik dan negatif. Ekspresi keagamaan mengenai khilafah dianggap sebagai ancaman trans-nasional kontemporer yang membahayakan eksistensi NKRI. Terdapat stigmatisasi bahwa wacana restorasi khilafah sebagai pemecah belah persatuan, anti kemajemukan, dan bertentangan dengan pilar-pilar kebangsaan. Selain itu, ekspresi keagamaan mengenai khilafah juga diidentikkan dengan radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme.

Berbagai pernyataan oleh aktor negara memperkuat sentimen negatif terhadap ekspresi keagamaan mengenai khilafah. Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Basarah, menjelaskan bahwa khilafah adalah doktrin keagamaan sempit yang ingin menciptakan negara Islam dengan sistem khilafah dunia.³⁶ Khilafah dinilai sebagai ancaman nyata yang ingin menggantikan ideologi Pancasila.³⁷ Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menyatakan bahwa khilafah adalah isu yang berpotensi merusak tatanan bernegara dan menimbulkan radikalisme.³⁸

Stigmatisasi juga diberikan kepada kelompok-kelompok yang mengukung wacana khilafah. Pada 2017, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkam), Wiranto, menyatakan bahwa HTI memiliki kedekatan dengan kelompok ISIS. Pernyataan ini diucapkan Wiranto dalam konteks mewaspadaai kembalinya Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah menjadi mantan petempur ISIS. Wiranto menyatakan bahwa pemerintah mewaspadaai setiap kelompok yang ingin membawa ideologi selain Pancasila. Wiranto menyatakan, "Dampak untuk Indonesia, maka kita hadapi gerakan trans-nasional yang jelas sangat tidak nasionalis dan tidak NKRI dan Pancasila, dan saya menyatakan HTI termasuk memiliki hubungan dekat dengan ISIS." Untuk mengantisipasi kondisi "darurat" itu, Wiranto menegaskan bahwa negara memiliki prioritas untuk menciptakan kondisi nasional. Wiranto menambahkan, dalam konteks tersebut, presiden dapat mengeluarkan diskresi kebijakan yang luar biasa.³⁹

Dengan kata lain, ekspresi keagamaan mengenai khilafah telah mengalami objek sekuritisasi. Gambaran negatif terhadap konsepsi khilafah tidak terlepas dari sekuritisasi yang dilakukan *securitizing actor*. Dengan

mengidentifikasi ide khilafah kepada tren radikalisme-terorisime, wacana mengenai khilafah kemudian dianggap sebagai ancaman kontemporer terhadap Indonesia. Negara digambarkan sedang dalam kondisi “genting” menghadapi ancaman ideologi radikalisme keagamaan terbaru. Karena menghadapi keadaan “genting,” maka negara berhak menindak para pihak yang memiliki ekspresi keagamaan mengenai khilafah.

Proses Sekuritisasi

Sekuritisasi merupakan konsep yang membahas bahwa hal keamanan bukan hanya terbatas pada isu tradisional seperti ancaman militer ataupun perang konvensional antar negara. Namun sekuritisasi memandang bahwa isu keamanan mencakup isu yang lebih luas, mencakup isu keamanan politik, masyarakat, sosial ekonomi, dan lingkungan hidup. Dengan sekuritisasi, hal-hal yang sebelumnya bukan merupakan sebuah ancaman, kemudian dikonstruksi menjadi isu ancaman. Konsep ancaman bukan merupakan sesuatu yang “natural”, tetapi dirancang dirancang oleh *securitizing actor*. Hal-hal non-militer dapat berubah menjadi ancaman urgen yang harus diatasi ketika dilabeli dengan istilah “berbahaya” atau “mengancam.” Terdapat konstruksi “kegentingan” dari isu-isu yang dianggap sebagai ancaman. Karena itu, sekuritisasi merupakan bentuk lebih lanjut dari politisasi. Sekuritisasi identik dengan ancaman, *survival*, urgensi, dan pertahanan.⁴⁰

Sekuritisasi ini dapat dibuat oleh *securitizing actor* yang dapat berupa aktor negara, kelompok, masyarakat, ataupun individu. *Securiting actor* ini berbicara bahwa ada *object referent* yang mendapat ancaman dari ancaman eksistensial.⁴¹ Namun dalam banyak hal, sekuritisasi seringkali dibuat oleh *securitizing actor* dengan cara melakukan *speech act* yang berulang-ulang sehingga meyakinkan publik akan adanya ancaman genting terhadap keamanan terhadap negara atau masyarakat. *Speech act* dilakukan rezim dengan berbagai instrumen, seperti melalui konferensi pers, media, seminar, dan sebagainya.⁴² *Speech act* dilakukan dengan meyakinkan publik sedang menghadapi ancaman eksistensial dari sesuatu. Terdapat “dramatisasi” masalah dalam proses sekuritisasi.⁴³ Dengan kata lain, terjadi “dramatisasi” masalah untuk meyakinkan publik akan adanya isu keamanan dari yang

sebelumnya bukan merupakan masalah keamanan. “Dramatisasi” masalah tersebut harus diselesaikan dengan prioritas utama di luar kebiasaan prosedur yang berlaku.⁴⁴

Publik harus dapat diyakinkan bahwa *securitizing actor* berhak melakukan tindakan tidak lazim atas nama kondisi darurat. Dari konstruksi ancaman tersebut, lantas untuk mengatasi ancaman tersebut, diperlukan tindakan-tindakan di luar kebiasaan. Tindakan di luar kebiasaan tersebut termasuk di dalamnya adalah mobilisasi aparat keamanan dan relawan untuk bersama mengatasi sesuatu yang dianggap sebagai ancaman eksistensial.⁴⁵ Isu keamanan merupakan konstruksi dari pengambil kebijakan. Sekuritisasi memungkinkan tindakan urgen untuk mengatasi kondisi genting bahkan tanpa melewati prosedur demokrasi. Sekuritisasi merupakan proses dimana masalah-masalah yang diperbincangkan atau tidak diperbincangkan di publik, diangkat menjadi isu keamanan dengan tingkat urgen sehingga dapat mengabaikan perdebatan publik dan prosedur demokrasi.⁴⁶

Konsekuensinya, sekuritisasi mengabaikan prinsip demokrasi. Publik diyakinkan bahwa karena terdapat ancaman yang genting, maka pencegahan yang luar biasa dan bahkan melanggar aturan untuk melawan ancaman tersebut dapat dibenarkan.⁴⁷ Hal yang perlu diperhatikan dalam kajian sekuritisasi adalah, sekuritisasi akan sukses dilakukan jika memenuhi beberapa syarat, pertama pihak yang melakukan sekuritisasi memiliki kemampuan meyakinkan. Kedua, *speech act* harus dapat meyakinkan publik. Ketiga, publik harus memiliki akses informasi terhadap berbagai instrumen *speech act*. Keempat, sekuritisasi dilakukan tepat pada kondisi sosial-ekonomi yang mendukung.⁴⁸

Dalam politik Indonesia kontemporer, pemerintah sebagai *securitizing actor* melalui berbagai agensinya menyebarkan konstruksi ancaman dari ekspresi keagamaan mengenai khilafah. Khilafah dikonstruksi sebagai ancaman eksistensial terhadap kedaulatan *nation-state* dan pilar kebangsaan. Sekuritisasi ditunjukkan dengan mengkonstruksikan wacana khilafah dengan tren terorisme ISIS. Konstruksi tersebut seiring dengan tren ISIS yang mendeklarasikan kekhilafahan secara sepihak di Irak dan Syria pada 2014. Dalam “masa keemasannya” pada 2014-2016, ISIS aktif mempropagandakan klaim kekhilafahan.⁴⁹ Namun klaim sepihak ISIS

mengenai khilafah tersebut ditolak oleh berbagai kelompok Islam di Indonesia, termasuk oleh kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang juga memiliki idealisme khilafah.⁵⁰

Praktik sekuritisasi terhadap wacana khilafah mulai masif dilakukan sejak pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan HTI pada 2017. Pemerintah menyatakan bahwa karena HTI memiliki agenda mengenai khilafah, maka kegiatan yang dilakukan kelompok tersebut bertentangan dengan dasar-dasar negara. Konsepsi mengenai khilafah dianggap tidak sesuai dengan Pancasila, sehingga dianggap dapat mengancam keutuhan NKRI yang berbasis semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara yang multikultural, sedangkan khilafah dianggap hanya merepresentasikan ide sebagian kelompok Muslim yang ada di Indonesia.

Alasan yang dikemukakan pemerintah adalah HTI tidak memiliki peran dalam pembangunan, mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan NKRI.⁵¹ Menkopolkum menyatakan bahwa pembubaran HTI adalah untuk menyelamatkan kedaulatan negara.⁵² Salah satu yang dibuat menjadi dasar pencabutan badan hukum HTI tersebut adalah rekaman dakwah HTI yang mengkampanyekan khilafah.⁵³ Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemendagri tahun 2017, disebutkan bahwa HTI mengusung ideologi khilafah yang berorientasi menghilangkan negara-bangsa.⁵⁴ Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, menyatakan bahwa HTI dibubarkan karena mengusung konsep khilafah yang ingin mengganti Pancasila.⁵⁵

Menkopolkum, Wiranto, menyebutkan bahwa tidak ada kompromi dengan pihak-pihak yang mengancam NKRI, termasuk HTI yang mengusung ide khilafah. Menurut Wiranto, ancaman terhadap NKRI ini bukan hal yang biasa, tetapi hal yang luar biasa.⁵⁶ Pada Juli 2017, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) no. 2 tahun 2017. Perppu tersebut sekaligus menggantikan UU No. 17 tahun 2013. Perppu tersebut bersifat kontroversial karena mempermudah mekanisme pembubaran organisasi masyarakat (ormas), menghapus mekanisme pengadilan sebelum pembubaran ormas, serta definisi yang longgar mengenai paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan

berdasar Perppu kontroversial tersebut, pemerintah mencabut status badan hukum HTI. Pemerintah juga mewacanakan aturan untuk melarang setiap individu menyebarkan paham khilafah. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan akan “menggebuk” ormas yang dinilai anti-Pancasila.⁵⁷

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menyatakan bahwa khilafah akan memecah belah bangsa. Tito Karnavian menyatakan bahwa paham-paham baru seperti khilafah, teroris, jihadi, dan takfiri adalah akibat globalisasi yang menginfiltrasi masyarakat. Lebih lanjut, Tito Karnavian menyatakan bahwa jika berbagai ideologi radikal berkembang, maka Indonesia dapat terpecah seperti Uni Soviet.⁵⁸ Lemhannas, dalam publikasi Swantara September tahun 2017, menyatakan bahwa Indonesia menghadapi ancaman fisik dan non-fisik. Namun ancaman non-fisik dipandang lebih besar tingkat ancamannya dibandingkan ancaman fisik. Salah satu ancaman non-fisik tersebut adalah upaya kelompok-kelompok radikal di Indonesia untuk mengubah konsensus para pendiri bangsa.⁵⁹ Upaya tersebut di antaranya adalah keberadaan organisasi yang mengkampanyekan sistem khilafah di Indonesia. Kajian mengenai khilafah dilakukan di Lemhanas. Dalam dokumen Rangka Pelajaran Pokok (RPP) Program Pendidikan Reguler Angkatan LX tahun 2020 Lemhanas RI, terdapat diskusi panel dengan topik “NKRI dan Khilafah.”⁶⁰

Menteri Pertahanan, Rymizard Ryacudu, dalam pernyataannya di forum *Indonesia International Defense Science Seminar*, menyatakan bahaya perang *mindset* paham khilafah bersifat sistematis dan terstruktur ingin menggantikan dasar-dasar negara Indonesia. Ryacudu menyatakan bahwa perang *mindset* ini adalah ancaman yang nyata dan berbahaya bagi Indonesia.⁶¹ Menkopolkam, Wiranto, menyatakan bahwa khilafah adalah bentuk pengingkaran dari persatuan yang dicanangkan pendahulu bangsa.⁶²

Dalam perkembangannya, pemerintah aktif melakukan *speech act* ke berbagai sektor untuk mengkonstruksikan bahaya khilafah. Badan Intelijen Keamanan Polri (Baintelkam Polri), dalam rangka Workshop Nasional Asosiasi Masjid Kampus Indonesia pada 10 November 2018, menerbitkan dokumen “Bahan Kapolri Tentang Gerakan Dakwah Intelektual Kampus dalam Rangka Menangkal Radikalisme.” Dalam dokumen tersebut,

Baintelkam Polri menyatakan adanya ancaman yang membahayakan NKRI serta merugikan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Ancaman tersebut adalah keberadaan kelompok radikal di lingkungan masjid kampus. Dalam dokumen tersebut, kelompok yang disebut sebagai pendukung khilafah adalah kelompok HTI dan Wahabi yang berbahaya bagi NKRI.⁶³

Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melansir data mengenai radikalisme. Belmawa Ristekdikti, dengan mengutip penelitian oleh Alvares, mengungkapkan data, terdapat penyebaran radikalisme mahasiswa yang salah satu indikasinya adalah menyetujui khilafah. Data dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa sekitar 19,6% mahasiswa mendukung peraturan daerah (Perda) Syari'ah, 17,8% setuju khilafah, 16,8% mendukung ideologi Islam, 34,3% lebih memilih membantu Palestina karena kesamaan agama. Menristekdikti menyatakan terdapat sepuluh perguruan tinggi yang telah lama terpapar radikalisme.⁶⁴

Untuk mencegah radikalisme, Kemenristekdikti membuat aturan Permenristekdikti 55 tahun 2018 yang berisi pembinaan kebangsaan perguruan tinggi terhadap mahasiswa. Permenristekdikti tersebut berisi pembentukan organisasi kemahasiswaan sebagai wadah pembinaan ideologi Pancasila. Selain itu, Kemenristekdikti aktif menyelenggarakan deklarasi anti-radikalisme di berbagai kampus. Kemenristekdikti juga melibatkan BIN dan BNPT dalam proses pemilihan rektor. Kemenristekdikti meminta kampus untuk mendata akun media sosial dosen, mahasiswa, dan pegawai untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Kemenristekdikti menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penangkalan Paham Radikalisme di Perguruan Tinggi.⁶⁵

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2018, menerbitkan dokumen untuk publik "Menangkal Radikalisme di Pendidikan."⁶⁶ Salah satu indikator radikalisme yang digunakan dalam dokumen tersebut adalah menyetujui khilafah. Bahkan dalam dokumen tersebut dijelaskan contoh kasus di beberapa sekolah terdapat tenaga pendidik dan kependidikan yang menyetujui khilafah.

Kementerian Agama (Kemenag) turut memperhatikan kajian mengenai khilafah. Kemenag merevisi pembahasan bab khilafah di madrasah. Bab

khilafah dipindah dari kajian fiqh menjadi pembahasan sejarah. Dalam dokumen program prioritas Kemenag tahun 2019-2020, disebutkan salah satu program prioritas Kemenag adalah melawan paham khilafah.⁶⁷

Menteri Pertahanan, Rymizard Ryacudu merilis terdapat 23,4% mahasiswa setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah, 23,3% pelajar SMA jihad untuk negara Islam atau khilafah, 18,1% pegawai swasta tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 19,4% PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 9,1% pegawai BUMN tidak setuju dengan ideologi negara, dan 3% prajurit TNI yang terpengaruh dan tidak setuju ideologi Pancasila.⁶⁸ Selain itu, BIN juga merilis data bahwa terdapat 41 masjid di lingkungan pemerintah dan BUMN yang terpapar radikalisme. Salah satu indikator masjid radikal adalah terdapat ceramah yang positif terhadap khilafah.⁶⁹ Renstra Dewan Ketahanan nasional 2015-2019 menyoroti kelompok kanan yang memiliki agenda penegakan syariat Islam dan khilafah. Dalam dokumen tersebut, Dewan Ketahanan Nasional mengharapkan peran pers sebagai fungsi kontrol sosial masyarakat.⁷⁰ Redaksi media “Jalan Damai” edisi Januari 2019-media resmi milik Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)-menyatakan bahwa pada tahun 2019 narasi mengenai khilafah masih cukup tinggi dan menghiasi *framing* kejadian dan peristiwa nasional. Redaksi media BNPT tersebut menilai bahwa ancaman ini akan berlanjut pada 2020. Narasi khilafah ini identik dengan intoleransi, anti-NKRI, dan anti-Pancasila.⁷¹

Dampak Sekuritisasi Wacana Khilafah

Wacana khilafah berkembang dan menjadi aspirasi sebagian kelompok Muslim sejak era reformasi 1998. Sejak 1998, wacana tersebut berkembang serta menjadi isu populer. Wacana mengenai khilafah diekspresikan dalam berbagai kegiatan religi sebagai bagian dari ekspresi keagamaan. Selain itu, perkembangan wacana mengenai khilafah menjadi bagian realita demokrasi Indonesia. Hal tersebut nampak dalam perkembangan gerakan berbagai kelompok yang menerima konsep khilafah. Namun tren sekuritisasi terhadap wacana khilafah kemudian mengidentikkan khilafah sebagai sebuah ancaman terhadap negara. Sekuritisasi meniscayakan bagaimana negara dapat menggeser fokus dari hal yang sebelumnya bukan isu keamanan

menjadi isu keamanan. Isu keamanan tersebut dianggap “darurat” dan “genting,” sehingga membutuhkan langkah-langkah prioritas untuk mengatasi masalah tersebut.

Untuk meyakinkan publik, *securitizing actor* melakukan *speech act* yang menyatakan negara menghadapi ancaman genting. Beragam pernyataan *securitizing actor*, dilakukan berulang di berbagai forum. Sosialisasi mengenai bahaya khilafah gencar dilakukan melalui berbagai kegiatan, seminar, konferensi, dan pertemuan lainnya. Media menjadi sarana bagi tindakan *speech act* yang dilakukan *securitizing actor* kepada publik. Langkah tersebut diambil untuk meyakinkan publik akan adanya ancaman dari wacana khilafah. Tren lainnya, untuk mensekuritisasi wacana khilafah, *securitizing actor* cenderung mengidentikkan khilafah dengan radikalisme dan terorisme. Indikator untuk mengukur seseorang telah terpapar radikalisme atau tidak. Salah satu indikator radikalisme menggunakan poin setuju atau tidak terhadap wacana khilafah. *Securitizing actor* menarasikan kelompok pendukung khilafah seperti HTI identik dengan kelompok yang dekat dengan ISIS. Wacana khilafah yang sebelumnya adalah ekspresi keagamaan, kemudian identik dengan radikalisme dan terorisme.

Sekuritisasi terhadap wacana khilafah memiliki dampak terhadap kebebasan berekspresi serta mengeluarkan pendapat. Termasuk potensi ancaman terhadap kebebasan mimbar akademik di tingkat perguruan tinggi. Dalam beberapa kasus, pendidik di perguruan tinggi mendapat peringatan oleh pihak universitas karena dianggap “terpapar radikalisme”. Terdapat kasus akademisi dipanggil pihak universitas untuk menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi terlibat dalam aktivitas “radikalisme.” Juga terdapat kasus pemberhentian dari jabatan struktural terhadap akademisi yang dianggap mendukung kelompok pro-khilafah, misalnya kasus sanksi terhadap akademisi yang menjadi saksi ahli bagi HTI di sidang PTUN. Kasus lainnya adalah ancaman sanksi terhadap akademisi yang terlibat dalam *meme* mendukung HTI. Pendidikan tinggi yang memiliki idealisme berpikir kritis dan memiliki kebebasan mimbar akademik, mendapat batasan dengan istilah “terpapar radikalisme.”

Sekuritisasi juga memiliki dampak terhadap potensi konflik horizontal di masyarakat. Pada 2018, terjadi pembakaran simbol bendera bermotif

kalimat tauhid oleh oknum ormas, yang menganggap kalimat tauhid sebagai simbol HTI. Peristiwa pembakaran bendera tauhid tersebut memobilisasi aksi balasan masyarakat dalam Aksi Bela Tauhid. Terdapat beberapa kasus persekusi terhadap individu atau kelompok yang identik dengan pro-khilafah. Kasus ancaman pembubaran beberapa forum pengajian yang diisi oleh tokoh agama yang dianggap pro-khilafah, terjadi di Pasuruan, Malang, dan Jakarta. Termasuk acara Khilafatul Muslimin yang bertajuk “Siyar dan Silaturahmi Kekhalifahan Islam se-Dunia” di Bogor yang akan diselenggarakan di Masjid Az-Zikra Bogor pada 2018, dibatalkan karena tidak mendapat izin dari kepolisian. Khilafatul Muslimin juga menjadi organisasi yang diawasi di beberapa kota. Selanjutnya, kelompok FPI juga dipermasalahkan. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mempersoalkan istilah “khilafah Islamiyah” dalam AD/ART FPI. Ancaman terhadap jaminan berserikat juga ditandai dengan pencabutan badan hukum HTI dengan menggunakan Perppu No. 2 tahun 2017 yang kontroversial.

Sekuritisasi juga terjadi akibat tidak ada kesepakatan bersama mengenai definisi pasti mengenai apa yang dimaksud dengan radikalisme sehingga istilah radikalisme menjadi mudah disematkan oleh *securitizing actor* kepada pihak manapun. Ekspresi keagamaan seperti merindukan khilafah, atau tidak setuju terhadap pemimpin non-Muslim, atau setuju Perda Syariah, digolongkan termasuk ke dalam kategori “radikalisme.” Karena ketiadaan indikator yang disepakati bersama tersebut, sehingga istilah radikalisme rawan digunakan secara politis untuk membungkam ekspresi keagamaan. Terlebih istilah radikalisme ini kemudian dikaitkan dengan fenomena tren terorisme ISIS. Termasuk dalam konteks ini adalah ekspresi keagamaan mengenai khilafah yang dikonstruksi identik dengan fenomena pemikiran takfiri, intoleran, radikalisme dan terorisme.

Kesimpulan

Narasi mengenai bahaya wacana khilafah adalah produk hasil sekuritisasi. Wacana khilafah yang awalnya merupakan ekspresi keagamaan sebagian kelompok umat Islam, kemudian diidentikkan sebagai ancaman eksistensial yang membahayakan negara. Perkembangan wacana mengenai khilafah digambarkan sebagai perang *mindset* dari kelompok “radikal” yang

ingin menggantikan dasar negara. Proses sekuritisasi berlangsung melalui berbagai aksi *speech act* yang berlangsung secara simultan. *Speech act* dilakukan baik melalui konferensi, keterangan pers, maupun pemberitaan media. Paparan data ini diulang-ulang oleh *securitizing actor* untuk meyakinkan publik. Proses sekuritisasi memiliki dampak pada jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Diperlukan kajian lebih lanjut serta pemaknaan yang jelas mengenai konsep khilafah, radikalisme, dan terorisme.

Catatan Akhir

¹ Abdul Azis, *Chiefdom Madinah: Salah Pabam Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), 108.

² İsmail Hakkı Göksoy, "Ottoman-Aceh Relations as Documented in Turkish Sources." Dalam *Mapping The Acehnese Past*. Anthony Reid, R. Michael Feener, Patrick T. Daly (ed), (Leiden: KITLV Press, 2011), 67

³ Indra Utama Tanjung, 2018. "Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah di Indonesia." *Jurnal Penelitian Medan Agama* Vol. 9, No. 1, 2018 : 121.

⁴ Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 132.

⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Abkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. (Jakarta: Darul Falah, 2007), 1-10.

⁶ As'ad Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi*. (Jakarta: LP3ES, 2012), 80.

⁷ Sri Yunanto, *Negara Khilafah Versus Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Jakarta: IPSS, 2017), 61.

⁸ Ibad Durohman dan Gresnia Arela F, "Melucuti Jejaring HTI," 2017, <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20170726/Melucuti-Jejaring-HTI/>.

⁹ antaranews.com, "Hizbut Tahrir Adakan Konferensi Khilafah Internasional," 2007, <https://www.antaranews.com/berita/73083/hizbut-tahrir-adakan-konferensi-khilafah-internasional>.

¹⁰ hizb-indonesia.info, "Polres Malang Kota Berikan Piagam Penghargaan Kepada HTI Malang," 2012, (<http://hizb-indonesia.info/2012/07/02/polres-malang-kota-berikan-piagam-penghargaan-kepada-hti-malang/>).

¹¹ Moch Nur Ichwan, "Menuju Islam Moderat Puritan: Majelis Ulama Indonesia dan Politik Ortodoksi Keagamaan." Dalam *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, Martin van Bruinessen (ed), (Jakarta: Mizan, 2014), 107.

¹² CRCS, "Haruskah HTI Dibubarkan?," 2017, <https://crccs.ugm.ac.id/haruskah-hti-dibubarkan/>.

¹³ dpr.go.id, "Audiensi Komisi I DPR RI dengan Hizbut Tahrir Indonesia dan Aqsa Working Group," 2009, <http://dpr.go.id/arsip/indexaw/id/65>.

¹⁴ Sri Yunanto, *Negara Khilafah Versus Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Jakarta: IPSS, 2017), 125.

¹⁵ Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. (Jakarta: Mizan, 2013), 396.

¹⁶ Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. (Jakarta: Mizan, 2013), 417.

¹⁷ Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*. (Jakarta: Avabeta, 2004), 78.

¹⁸ Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. (Jakarta: Mizan, 2013), 401.

¹⁹ Majelis Mujahidin, "Strategi Perjuangan Majelis Mujahidin," 2020
<https://www.majelismujahidin.com/about/strategi-perjuangan-majelis-mujahidin/>.

²⁰ Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. (Jakarta: Mizan, 2013), 434.

²¹ Haedar Nashir, *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. (Jakarta: Mizan, 2013), 444.

²² CNN Indonesia, "Tito Karnavian Sebut Izin FPI Terkendala Visi NKRI Bersyariah," 2009, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191128151404-32-452321/tito-karnavian-sebut-izin-fpi-terkendala-visi-nkri-bersyariah>.

²³ fpi-online.com, "Habib Hanif Al Athas: Khilafah Tanpa Menafikkan Eksistensi Negara Modern," 2020, <https://www.fpi-online.com/2020/01/habib-hanif-al-athas-khilafah-tanpa.html>.

²⁴ Panji Gumilang, "Seruan Khilafah Rizieq Shihab di Jantung FPI," 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170815154404-20-234919/seruan-khilafah-rizieq-shihab-di-jantung-fpi/2>.

²⁵ Media Ummat, "Habib Rizieq Shihab: Menghina Sistem Khilafah, Menghina Ajaran Islam," *Media Ummat* Edisi 202, 25 Agustus-7 September 2017.

²⁶ Majelis Mujahidin, "Dialog Wantimpres 2014 "Apakah Indonesia Negara Thaghut," 2014, dalam <https://www.majelismujahidin.com/dialog-wantimpres-2014-apakah-indonesia-negara-thaghut/>.

²⁷ Ghulam Shidiq, "Mau Tahu Apa Itu Khilafah?," 2015, <http://khilafatulmuslimin.net/mau-tahu-apa-itu-khilafah>.

²⁸ Nasroh Pusat, "Dokumentasi Perjalanan Khilafatul Muslimin," 2016, https://www.youtube.com/watch?v=To-zQ_ydTt4.

²⁹ Firman Juliansyah, Yusuf Yusuf, Aris Arif Mundayat, "Strategi Pemerintah Dalam Menghadapi Gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Peperangan Asimetris*. Vol.5, No. 1, April 2019: 41.

³⁰ khilafatulmuslimin.net, "FAQ Khilafatul Muslimin," 2019, <http://khilafatulmuslimin.net/faq-khilafatul-muslimin/>.

³¹ Daulah Khilafatul Muslimin Indonesia Timur, "Khilafah yang Ditawarkan Khilafatul Muslimin bukan Konsep Khilafah yang Dilarang Negara," 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=i2LcX2Hwg08>.

³² Yudi Zulfahri, *Bayang-Bayang Terorisme: Potret Genealogi dan Ideologi Terorisme di Indonesia*. (Jakarta: Milenia, 2020), 96.

³³ Abdel Bari Atwan, *Islamic State: The Digital Caliphate*. (California: University of California Press, 2015), 122.

³⁴ Reza Pankhurst, *The Inevitable Caliphate? A History of the Struggle for Global Islamic Union, 1924 to the Present*. (Oxford: Oxford University Press, 2013), 159.

³⁵ shautululama.co, “Multaqā Ulama Aswaja Mataraman, Jatim: Ulama Siap Pimpin Umat Menuju Tegaknya Khilafah, Tinggalkan Kapitalisme dan Campakkan Komunisme,” 2020, (<https://shautululama.co/multaqa-ulama-aswaja-mataraman-jatim-ulama-siap-pimpin-umat-menuju-tegaknya-khilafah-tinggalkan-kapitalisme-dan-campakkan-komunisme/>).

³⁶ mpr.go.id, “Ahmad Basarah: Perlu Gerakan Pembudayaan Pancasila,” 2016, <https://mpr.go.id/berita/detail/ahmad-basarah-perlu-gerakan-pembudayaan-pancasila>.

³⁷ mpr.go.id, “Ahmad Basarah: Jangan Pernah Berfikir untuk Mengganti Ideologi Pancasila,” 2016, <https://mpr.go.id/berita/detail/ahmad-basarah-jangan-pernah-berfikir-untuk-mengganti-ideologi-pancasila>.

³⁸ wapres.ri, “Cegah Perpecahan, Ormas Islam Harus Miliki Ideologi yang Sama,” 2020, <https://www.wapresri.go.id/cegah-perpecahan-ormas-islam-harus-miliki-pemahaman-ideologi-yang-sama/>.

³⁹ Yulida Mediatira, “Wiranto: HTI Memiliki Hubungan Dekat ISIS,” 2017, (<https://news.detik.com/berita/d-3504252/wiranto-hti-memiliki-hubungan-dekat-isis>).

⁴⁰ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. (Depok: Kencana, 2017), 141.

⁴¹ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 180.

⁴² Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 187.

⁴³ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. (Depok: Kencana, 2017), 141

⁴⁴ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 180.

⁴⁵ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 187.

⁴⁶ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. (Depok: Kencana, 2017), 141

⁴⁷ Umar Suryadi Bakry, *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. (Depok: Kencana, 2017), 141

⁴⁸ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 189.

⁴⁹ Prihandono Wibowo dan Renitha Dwi Hapsari, “Ancaman Terorisme Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Pasca Fase “Khilafah”.” *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*. Vol. 12, No. 1. Januari 2020: 24.

⁵⁰ Fendi E. Wahyudi, dan Prihandono Wibowo, *ISIS Vis A Vis Islamisme*. (Surabaya: Revka Petra Media, 2017), 85.

⁵¹ Humas Kemenko Polhukam, “Pemerintah Bubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia,” 2017, <https://polkam.go.id/pemerintah-bubarkan-ormas-hizbut-tahrir-indonesia/>.

⁵² Humas Kemenko Polhukam, “Menko Polhukam: Pembubaran HTI Untuk Selamatkan Kedaulatan Negara,” 2017, <https://polkam.go.id/menko-polhukam-pembubaran-hti-untuk-selamatkan-kedaulatan-negara/>.

⁵³ tempo.co, "HTI Dibubarkan, Rekaman Dakwah Pendirian Khilafah Jadi Bukti," 2017, <https://nasional.tempo.co/read/873930/hti-dibubarkan-rekaman-dakwah-pendirian-khilafah-jadi-bukti/full&view=ok>.

⁵⁴ Kemenkopolkhukam, "Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017," 2018, https://polkam.go.id/konten/unggahahan/2018/04/LAKIP_DEPUTI_VI_TA_2017.pdf

⁵⁵ Panji Gumilang, "HTI Ingin Ganti Pancasila Jadi Khilafah," 2017, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170512135522-12-214314/kepala-bin-hti-ingin-ganti-pancasila-jadi-khilafah>.

⁵⁶ bbc.com, "Menkopolkhukam: "Tidak ada kompromi" soal pembubaran HTI," 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39893470>.

⁵⁷ tempo.co, "Jokowi Ajak TNI Gebuk Organisasi Anti-Pancasila, Termasuk PKI," 2017, <https://nasional.tempo.co/read/876879/jokowi-ajak-tni-gebuk-organisasi-anti-pancasila-termasuk-pki/full&view=ok>.

⁵⁸ Ramadhan Rizki, "Kapolri Sebut Khilafah Ancaman yang Memecah Indonesia," 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180718164711-20-315145/kapolri-sebut-khilafah-ancaman-yang-memecah-indonesia>.

⁵⁹ Ibnu Triwidodo, "Pasang Surut Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Bangsa Indonesia," *Swantara*, Edisi No 22 Tahun VI September 2017.

⁶⁰ Lemhannas Republik Indonesia, "Rangka Pelajaran Pokok (RPP) Program Pendidikan Reguler Angkatan LX tahun 2020," Lemhannas RI, 2020.

⁶¹ Egi Adyatama, "Menhan Rymizard Ryacudu Ingatkan Bahaya Perang Mindset Khilafah," 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1203269/menhan-ryamizard-ryacudu-ingatkan-bahaya-perang-mind-set-khilafah/full&view=ok>.

⁶² Humas Kemenko Polhukam, "SDM Faktor Penentu Perjuangan Bangsa," 2019, <https://polkam.go.id/sdm-faktor-penentu-kemajuan-bangsa/>.

⁶³ Badan Intelijen Keamanan Biro Analis, "Bahan Kapolri Tentang Gerakan Dakwah Intelektual Masjid Kampus Dalam Rangka Menangkal Radikalisme," 2018, <https://amki.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/GERAKAN-DAKWAH-INTELEKTUAL-KAMPUS-MENANGKAL-RADIKALISME-Mediyah-Polri.pdf>

⁶⁴ belmawa.ristekdikti.go.id, 2017, <http://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2017/12/Paparan-Narsum-Materi-Radikalisme-Dikti-2.0.pptx>.

⁶⁵ ristekdikti.go.id, "Kemenristekdikti Sinergikan Upaya Penangkalan Paham Radikalisme di Perguruan Tinggi," 2018, <https://www.ristekdikti.go.id/siaran-pers/kemenristekdikti-sinergikan-upaya-penangkalan-paham-radikalisme-di-perguruan-tinggi/>.

⁶⁶ "Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, *Menangkal Radikalisme Dalam Pendidikan*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.

⁶⁷ Kementerian Agama, "Pokok-Pokok Pikiran Menteri Agama Republik Indonesia 2019-2020," 2019, <https://dki.kemenag.go.id/informasi-penting/74>.

⁶⁸ kompastv, "Menhan: 3 Persen Anggota TNI Terpapar Radikalisme," 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=QCzJthECpjs>.

⁶⁹ Syaiful Hadi, "Masjid Terpapar Radikalisme, P3M: Tema Ujaran Kebencian Tertinggi," 2018 <https://nasional.tempo.co/read/1148644/masjid-terpapar-radikalisme-p3m-tema-ujaran-kebencian-tertinggi>.

⁷⁰ Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, 2015, <https://www.wantannas.go.id/wp-content/uploads/sites/1/2018/03/publikasi-793411-renstra2015-2019.pdf>

⁷¹ Abd Malik, Budi Hartawan, Irfanditya Wisnu Wandana, Indra, "Teropong Potensi Radikalisme 2020". *jalandamai: Majalah Pusat Media Damai BNPT* edisi Januari 2019.

Daftar Referensi

Buku

- Amal, Taufik Adnan. *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Avabeta, 2004.
- Ali, As'ad Said. *Ideologi Gerakan Pasca- Reformasi*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Abkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2007.
- Aziz, Abdul. *Chiefdom Madinah: Salah Paham Negara Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.
- Atwan, Abdel Bari. *Islamic State: The Digital Caliphate*. California: University of California Press, 2015.
- Bakry, Umar Suryadi. *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Depok: Kencana, 2017.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. *Studi dan Teori Hubungan Internasional.: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Husaini, Adian, dan Nuim Hidayat. *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Nashir, Haedar. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: Mizan, 2013.
- Pankhurst, Reza. *The Inevitable Caliphate? A History of the Struggle for Global Islamic Union, 1924 to the Present*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Wahyudi, Fendi E., & Prihandono Wibowo. *ISIS Vis A Vis Islamisme*. Surabaya: Revka Petra Media, 2017.
- Yunanto, Sri. *Negara Khilafah Versus Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: IPSS. 2017.

Zulfahri, Yudi. *Bayang-Bayang Terorisme: Potret Genealogi dan Ideologi Terorisme di Indonesia*. Jakarta: Milenia, 2020.

Book Chapter

Ichwan, Moch Nur. "Menuju Islam Moderat Puritan: Majelis Ulama Indonesia dan Politik Ortodoksi Keagamaan." Dalam *Conservative Turn: Islam Indonesia*. Dalam *Ancaman Fundamentalisme*, Martin van Bruinessen (ed), 101-156, Jakarta: Mizan, 2014.

Göksoy, İsmail Hakkı. "Ottoman-Aceh relations as Documented in Turkish Sources." Dalam *Mapping The Acehnese Past*. Anthony Reid, R. Michael Feener, Patrick T. Daly (ed), 65-96. Leiden: KITLV Press, 2011.

Jurnal

Wibowo, Prihandono dan Renitha Dwi Hapsari. "Ancaman Terorisme Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Pasca Fase "Khilafah"." *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*. Vol. 12, No. 1. Januari 2020: 23-42.

Juliansyah, Firman, Yusuf Yusuf, Aris Arif Mundayat. "Strategi Pemerintah Dalam Menghadapi Gerakan Khilafatul Muslimin di Cikembar dan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Peperangan Asimetris*. Vol.5, No. 1, April 2019: 41-64.

Tanjung, Indra Utama. Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama* Vol. 9, No. 1, 2018 : 111-139.

Dokumen Resmi Pemerintah

Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. *Menangkal Radikalisme Dalam Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.

Badan Intelijen Keamanan Biro Analisis. "Bahan Kapolri Tentang Gerakan Dakwah Intelektual Masjid Kampus Dalam Rangka Menangkal Radikalisme." 2018. <https://amki.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/GERAKAN-DAKWAH->

INTELEKTUAL-KAMPUS-MENANGKAL-RADIKALISME-
Mediyan-Polri.pdf

- Kementerian Agama. “Pokok-Pokok Pikiran Menteri Agama Republik Indonesia 2019-2020.” 2019. <https://dki.kemenag.go.id/informasi-penting/74>.
- Kemenkopolhukam. “Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017.” 2018. https://polkam.go.id/konten/unggahan/2018/04/LAKIP_DEPUTI_VI_TA._2017.pdf
- Lemhannas Republik Indonesia. “Rangka Pelajaran Pokok (RPP) Program Pendidikan Reguler Angkatan LX tahun 2020.” Lemhannas RI, 2020.
- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. 2015. <https://www.wantannas.go.id/wp-content/uploads/sites/1/2018/03/publikasi-793411-renstra2015-2019.pdf>.

Majalah

- Triwidodo, Ibnu. 2017. “Pasang Surut Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Bangsa Indonesia.” *Swantara* Edisi No 22 Tahun VI September 2017.
- Malik, Abd, Budi Hartawan, Irfanditya Wisnu Wandana, Indra. Teropong Potensi Radikalisme 2020. *jalandamai: Majalah Pusat Media Damai BNPT* edisi Januari 2019.
- Media Ummat. “Habib Rizieq Shihab: Menghina Sistem Khilafah, Menghina Ajaran Islam.” *Media Ummat* Edisi 202, 25 Agustus-7 September 2017.

Artikel Online

- Adyatama, Egi. “Menhan Rymizard Ryacudu Ingatkan Bahaya Perang Mindset Khilafah.” 2019 [https://nasional.tempo.co/read/1203269/menhan-ryamizard-ryacudu-ingatkan-bahaya-perang-mind set-khilafah/full&view=ok](https://nasional.tempo.co/read/1203269/menhan-ryamizard-ryacudu-ingatkan-bahaya-perang-mind-set-khilafah/full&view=ok).

- antaranews.com.. "Hizbut Tahrir Adakan Konferensi Khilafah Internasional." 2007. <https://www.antaranews.com/berita/73083/hizbut-tahrir-adakan-konferensi-khilafah-internasional>.
- bbc.com. "Menkopolkam: "Tidak ada kompromi" soal pembubaran HTI". 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39893470>.
- belmawa.ristekdikti.go.id. 2017. <http://belmawa.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2017/12/Paparan-Narsum-Materi-Radikalisme-Dikti-2.0.pptx>.
- CNN Indonesia. "Tito Karnavian Sebut Izin FPI Terkendala Visi NKRI Bersyariah." 2009. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2019112815140432452321/tito-karnavian-sebut-izin-fpi-terkendala-visi-nkri-bersyariah>.
- CRCS. "Haruskah HTI Dibubarkan ?." 2017. <https://crcs.ugm.ac.id/haruskah-hti-dibubarkan/>.
- Daulah Khilafatul Muslimin Indonesia Timur. "Khilafah yang Ditawarkan Khilafatul Muslimin bukan Konsep Khilafah yang Dilarang Negara." 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=i2LcX2Hwg08>.
- dpr.go.id. "Audiensi Komisi I DPR RI dengan Hizbut Tahrir Indonesia dan Aqsa Working Group." 2009. <http://dpr.go.id/arsip/indexaw/id/65>.
- fpi-online.com. "Habib Hanif Al Athas: Khilafah Tanpa Menafikkan Eksistensi Negara Modern." 2020. <https://www.fpi-online.com/2020/01/habib-hanif-al-athas-khilafah-tanpa.html>.
- Gumilang, Panji. "Seruan Khilafah Rizieq Shihab di Jantung FPI." 2017. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170815154404-20234919/seruan-khilafah-rizieq-shihab-di-jantung-fpi/2>.
- _____."HTI Ingin Ganti Pancasila Jadi Khilafah." 2017. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170512135522-12214314/kepala-bin-hti-ingin-ganti-pancasila-jadi-khilafah>.
- hizb-indonesia.info. "Polres Malang Kota Berikan Piagam Penghargaan Kepada HTI Malang." 2012. (<http://hizb-indonesia.info/2012/07/02/polres-malang-kota-berikan-piagam-penghargaan-kepada-hti-malang/>).

- Humas Kemenko Polhukam. "Menko Polhukam: Pembubaran HTI Untuk Selamatkan Kedaulatan Negara." 2017. <https://polkam.go.id/menko-polhukam-pembubaran-hti-untuk-selamatkan-kedaulatan-negara/>.
-
- _____, "Pemerintah Bubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia." 2017 <https://polkam.go.id/pemerintah-bubarkan-ormas-hizbut-tahrir-indonesia/>.
-
- _____, "SDM Faktor Penentu Perjuangan Bangsa." 2019. <https://polkam.go.id/sdm-faktor-penentu-kemajuan-bangsa/> .
- Hadi, Syaiful. "Masjid Terpapar Radikalisme, P3M: Tema Ujaran Kebencian Tertinggi." 2018 <https://nasional.tempo.co/read/1148644/masjid-terpapar-radikalisme-p3m-tema-ujaran-kebencian-tertinggi>.
- Durohman, Ibad dan Gresnia Arela F. "Melucuti Jejaring HTI." 2017 <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20170726/Melucuti-Jejaring-HTI/>.
- khilafatulmuslimin.net. "FAQ Khilafatul Muslimin." 2019. <http://khilafatulmuslimin.net/faq-khilafatul-muslimin/>.
- kompastv. "Menhan: 3 Persen Anggota TNI Terpapar Radikalisme." 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=QCzJthECpjs>.
- Majelis Mujahidin. "Dialog Wantimpres 2014 "Apakah Indonesia Negara Thaghut." 2014. dalam <https://www.majelismujahidin.com/dialog-wantimpres-2014-apakah-indonesia-negara-thaghut/>.
-
- _____. "Strategi Perjuangan Majelis Mujahidin." 2020 <https://www.majelismujahidin.com/about/strategi-perjuangan-majelis-mujahidin/>.
-
- Mediastira, Yulida. "Wiranto: HTI Memiliki Hubungan Dekat ISIS." 2017. (<https://news.detik.com/berita/d-3504252/wiranto-hti-memiliki-hubungan-dekat-isis>).
- mpr.go.id. "Ahmad Basarah: Perlu Gerakan Pembudayaan Pancasila." 2016 <https://mpr.go.id/berita/detail/ahmad-basarah-perlu-gerakan-pembudayaan-pancasila>.

- _____. “Ahmad Basarah: Jangan Pernah Berfikir untuk Mengganti Ideologi” Pancasila. 2016 <https://mpr.go.id/berita/detail/ahmad-basarah-jangan-pernah-berfikir-untuk-mengganti-ideologi-pancasila>.
- Nasroh Pusat. “Dokumentasi Perjalanan Khilafatul Muslimin.” 2016. https://www.youtube.com/watch?v=T0-zQ_ydTt4.
- Rizki, Ramadhan. “Kapolri Sebut Khilafah Ancaman yang Memecah Indonesia.” 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180718164711-20-315145/kapolri-sebut-khilafah-ancaman-yang-memecah-indonesia>.
- ristekdikti.go.id. “Kemenristekdikti Sinergikan Upaya Penangkalan Paham Radikalisme di Perguruan Tinggi.” 2018. <https://www.ristekdikti.go.id/siaran-pers/kemenristekdikti-sinergikan-upaya-penangkalan-paham-radikalisme-di-perguruan-tinggi/>
- shautululama.co. “Multaqā Ulama Aswaja Mataraman, Jatim: Ulama Siap Pimpin Umat Menuju Tegaknya Khilafah, Tinggalkan Kapitalisme dan Campakkan Komunisme.” 2020. (<https://shautululama.co/multaqa-ulama-aswaja-mataraman-jatim-ulama-siap-pimpin-umat-menuju-tegaknya-khilafah-tinggalkan-kapitalisme-dan-campakkan-komunisme/>).
- Shidiq, Ghulam. “Mau Tahu Apa Itu Khilafah?” 2015. <http://khilafatulmuslimin.net/mau-tahu-apa-itu-khilafah>.
- tempo.co. “HTI Dibubarkan, Rekaman Dakwah Pendirian Khilafah Jadi Bukti.” 2017. <https://nasional.tempo.co/read/873930/hti-dibubarkan-rekaman-dakwah-pendirian-khilafah-jadi-bukti/full&view=ok>.
- _____. “Jokowi ajak TNI Gebuk Organisasi Anti-Pancasila, termasuk PKI.” 2017. <https://nasional.tempo.co/read/876879/jokowi-ajak-tni-gebuk-organisasi-anti-pancasila-termasuk-pki/full&view=ok>.
- wapres.ri. “Cegah Perpecahan, Ormas Islam Harus Miliki Ideologi yang Sama.” 2020. <https://www.wapresri.go.id/cegah-perpecahan-ormas-islam-harus-miliki-pemahaman-ideologi-yang-sama/>.